



Laporan Tahunan 2020







KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga laporan tahunan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini, disajikan untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan kegiatan organisasi, serta memberikan gambaran singkat mengenai rencana kegiatan ASPI di tahun mendatang.

Laporan ini juga mencakup laporan keuangan ASPI per 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, Certified Public Accountant (CPA), dengan opini audit: "Wajar", dalam semua hal yang material.

Demikian kami sampaikan pengantar bagi laporan tahunan ini.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Sekretariat ASPI

Gd. Graha Mandiri Lt. 18

Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat 10310

Telp: (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829

Fax: (62-21) 230 0393

Email: sekretariat@aspi-indonesia.or.id

Website: <https://www.aspi-indonesia.or.id/>

DAFTAR ISI

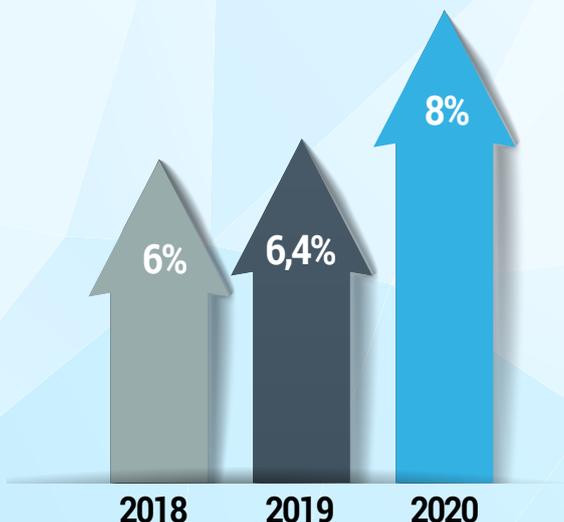
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Kinerja ASPI 2020	6
Laporan Badan Pengawas	10
Laporan Badan Pengurus	13
Bab 1: Profil ASPI	18
1.1 Sekilas ASPI	
1.2 Visi dan Misi ASPI	
1.3 Peran dan Komitmen ASPI	
1.4 Profil Badan Pengawas	
1.5 Profil Badan Pengurus	
1.6 Pelaksana Operasional	
Bab 2: Perkembangan Organisasi	30
Bab 3: Laporan Kegiatan ASPI Tahun 2020	36
Bab 4: Rencana Kegiatan ASPI 2021	42
Bab 5: Laporan Keuangan	46



KINERJA 2020

Per 31 Desember 2020

KEANGGOTAAN



161

 Anggota ASPI

Anggota Biasa : 138 Anggota Afiliasi : 23



SERTIFIKASI NSICCS



SURAT REKOMENDASI QRIS

71

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah mendapatkan surat rekomendasi ASPI



PERISTIWA PENTING 2020

29

Februari
2020

Soft launching CPM (Consumer Presented Mode) oleh Gubernur Bank Indonesia bertepatan dengan ASPI Executive Gathering

16

Juni
2020

Kick-off Penyusunan Open API dan pembentukan Working Group (WG) dan sub-WG Open API

21

Oktober
2020

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara ASPI dengan Forum Prinsipal sebagai pengalihan fungsi Certificate Authority (CA)

November

2020

ASPI bersama dengan perwakilan anggotanya telah berhasil melakukan Proof of Concept QRIS TTS

Desember

2020

Penyerahan Draft Standard Spesifikasi Open API & draft Standar Pedoman Tata Kelola kepada Bank Indonesia

Desember

2020

Penyerahan KASPI Liability Shift untuk mendorong percepatan penggunaan standar nasional berteknologi chip NSICCS (National Standard Indonesian Chip Card Specification) kepada Bank Indonesia





LAPORAN MANAJEMEN



Kartika Wirjoatmodjo
Ketua Badan Pengawas

LAPORAN BADAN PENGAWAS

Bapak dan Ibu perwakilan Anggota ASPI yang kami hormati,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami laporkan bahwa Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah berhasil melaksanakan berbagai program kerja serta inisiatif dalam rangka mendukung kemajuan sistem pembayaran nasional sepanjang tahun 2020. Dinamika dalam industri sistem pembayaran, dengan kehadiran pemain-pemain baru, inovasi produk dan layanan yang sangat cepat yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi, menghadirkan peluang dan tantangan baru bagi seluruh pemangku kepentingan di industri sistem pembayaran. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberi tekanan kepada perekonomian nasional dan global, namun di sisi lain dampaknya telah mengubah perilaku konsumen sehingga terjadi akselerasi adopsi solusi digital, termasuk dalam sistem pembayaran. Di tengah dinamika tersebut, ASPI telah berhasil melaksanakan fungsinya sebagai Self-Regulated Organization (SRO) dan Lembaga Standar di industri sistem pembayaran Indonesia.

Melalui Laporan Tahunan ini, kami menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan Badan Pengawas terhadap kinerja ASPI selama tahun 2020:

Kinerja Badan Pengurus

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020, Badan Pengawas berpendapat bahwa Badan Pengurus telah menunjukkan kinerja yang optimal untuk mencapai target-target ASPI. Segala tugas dan tanggung jawab telah dijalankan dengan baik, dan kami menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pengurus telah selaras dengan pandangan Badan Pengawas, dan sejalan dengan program Bank Indonesia sekaligus menyuarakan aspirasi dari pelaku industri sistem pembayaran Indonesia.

Pencapaian ASPI

Key Management dan Certificate of Authority (CA)

Dalam membangun ekosistem pembayaran yang terintegrasi dan berkesinambungan, ASPI telah melaksanakan peran sebagai Lembaga Standar dalam penyelenggaraan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dengan tugas utama mengelola *National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS)* untuk kartu ATM dan/atau kartu debit, di mana fungsi pengelolaan *Key Management* merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas pengelolaan standar. Pada bulan Oktober 2020, ASPI telah menyelesaikan pengambilalihan fungsi pengelolaan *Key Management* dari Forum Prinsipal, dan telah mulai melaksanakan tugas sebagai CA sejak saat itu.

Perkembangan dan Perluasan Fitur QRIS

Pada tahun 2020, implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan peningkatan inklusi keuangan, serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Pemberian award dalam kategori inovasi sistem pembayaran tahun 2020 dari Central Banking Publications kepada Bank Indonesia atas QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) yang dinilai sebagai inisiatif sistem pembayaran yang inovatif, menggunakan teknologi baru dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan meningkatkan inklusi keuangan, merupakan suatu bukti keberhasilan QRIS sebagai standar nasional yang dikembangkan oleh ASPI dengan dukungan Bank Indonesia.

ASPI bersama dengan perwakilan anggotanya yang duduk dalam beberapa Working Group QRIS terus berperan aktif dalam pengembangan, testing dan uji coba untuk metode baru dan fitur-fitur baru QRIS seperti *Customer Presented Mode* (CPM), Transfer, Tarik Tunai, Setor (TTS) dan cross border, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan akseptansi QRIS di masyarakat. Selain itu ASPI juga telah melakukan pendampingan dan pemberian bantuan pada calon PJSP QRIS yang akan menawarkan layanan QRIS kepada konsumen dan *merchant*. Untuk lebih memperkenalkan konsep interoperabilitas dan interkoneksi yang melekat pada standar QRIS, ASPI juga telah menerbitkan aturan mengenai tampilan QRIS MPM untuk memastikan keseragaman dan

konsistensi penggunaan Logo QRIS agar lebih mudah dikenali dan diterima secara luas oleh konsumen.

Standarisasi Open API Payment

ASPI secara aktif memberikan dukungan dalam pelaksanaan inisiatif Bank Indonesia yang merupakan perwujudan dari dua visi Bank Indonesia yang tercantum dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendorong transformasi digital dalam industri perbankan serta membangun *interlink* antara *fintech* dan perbankan. Untuk mengejawantahkan visi ini, ASPI telah diberikan kepercayaan oleh Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan perwakilan pelaku industri sistem pembayaran, menyusun Standar teknis Open API. Rancangan Standar Spesifikasi Open API dan Rancangan Standar Pedoman Tata Kelola telah disampaikan kepada Bank Indonesia di bulan Desember 2020.

Perubahan Susunan Badan Pengawas dan Badan Pengurus

Dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Tahun 2020, yang diadakan secara *virtual* pada tanggal 14 Agustus 2020, telah disetujui perubahan nama-nama komite dalam kepengurusan ASPI beserta pejabat yang mengepalai komite bersangkutan. kepengurusan ASPI. Penyesuaian tersebut dilakukan selaras dengan pembentukan Working Group dalam tim Bank Indonesia dan juga untuk mendukung pelaksanaan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Struktur Lama	Struktur Baru
Komite 1 : RTGS, SKN, Tanfer Valas, BI S4 Komite 2 : Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Komite 3 : eMoney Komite 4 : Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) Komite 5 : eBanking Komite 6 : Infrastruktur & Teknologi Sistem Pembayaran Komite 7 : Pengelola Standar NSICCS	Komite 1 : Open Banking - Ketua : Timothy Utama Komite 2 : Sistem Pembayaran Ritel - Ketua: Abraham J Adriaansz Komite 3 : Infrastruktur Pasar Keuangan dan SP - Ketua: Ari Y Asah Komite 4 : Data & Keamanan - Ketua Soejanto Soetjijo Komite 5 : Regulasi, Perijinan dan Pengawasan- Ketua : Ardhi Wibowo

Rencana Tahun 2021

Dengan dinamika industri pembayaran di Indonesia yang terus berkembang pesat, ASPI diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan merespon peluang yang terbuka untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, berorientasi pada pembangunan ekosistem yang sehat untuk perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia, serta memberikan arah pengembangan industri sistem pembayaran nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, ASPI sebagai mitra strategis Bank Indonesia, diharapkan mampu menyelaraskan program kerjanya sesuai dengan BSPI tersebut.

Komite 1 diharapkan terus berkontribusi khususnya dalam mempersiapkan implementasi tahap 1 Open API Payment. Komite 2 mempersiapkan implementasi fitur-fitur baru QRIS, BI-Fast tahap 1, dan berbagai inisiatif strategis lainnya dalam sistem pembayaran ritel, seperti fitur *contactless* (nirsentuh), MLFF, dll. Dengan diterbitkannya *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025, Komite 3 akan terus berkoordinasi dengan BI dalam rangka modernisasi infrastruktur pasar uang. Demikian pula Komite 4 yang akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan industri dalam rangka pengembangan data hub yang diharapkan akan mendukung kebutuhan industri sesuai konsep *data as services*. Yang tidak kalah penting adalah Komite 5 dalam mendukung reformasi pengaturan Sistem Pembayaran yang diinisiasi Bank Indonesia melalui penerbitan PBI No. 22/23/PBI/2020

tentang Sistem Pembayaran (PBI Payung SP) dan peraturan turunannya. ASPI memiliki komitmen untuk memberikan masukan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Penguatan sistem, infrastruktur, serta sumber daya manusia tetap menjadi modal penting, untuk menghadapi tantangan di tahun mendatang untuk bangkit dan melewati masa pandemi. ASPI juga harus terus berkolaborasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan sistem pembayaran Indonesia, serta mendukung terciptanya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, andal dan efisien.

Apresiasi dan Penutup

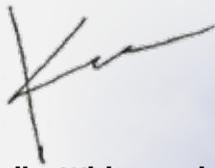
Atas nama Badan Pengawas, kami memberikan apresiasi kepada Badan Pengurus atas keberhasilan tahun 2020 dengan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil

guna mendukung kinerja ASPI yang terus berkembang di tengah berbagai tantangan dalam masa pandemic Covid-19.

Badan Pengawas juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim operasional ASPI atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan demi terlaksananya program-program ASPI.

Terima kasih pula kepada Bank Indonesia serta seluruh anggota ASPI yang telah memberikan kepercayaan, dukungan dan bersinergi bersama kami, sehingga tahun 2020 juga menjadi sebuah catatan keberhasilan bagi ASPI. Kami berharap ASPI dapat terus mengawal kemajuan sistem pembayaran nasional, serta mendukung pelaksanaan inisiatif Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Atas nama Badan Pengawas,
Jakarta, April 2021



Kartika Wirjoatmojo
Ketua Badan Pengawas



LAPORAN BADAN PENGURUS

Para Anggota ASPI yang kami hormati,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya, sehingga ASPI senantiasa dimampukan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta membuahkan hasil yang memberikan nilai tambah dan membanggakan kita semua. Tahun 2020, dengan kondisi perekonomian yang berkontraksi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, merupakan tahun yang berat dan penuh tantangan, namun hal ini sekaligus menjadi momentum bagi ASPI untuk meningkatkan peran dalam mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran guna mendukung pemulihan ekonomi nasional

Atas nama Badan Pengurus ASPI perkenankan kami menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus atas pengelolaan ASPI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, dengan opini “wajar”.

Sesuai dengan peran ASPI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), dan Lembaga Standar yang merupakan penyelenggara Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), maka kerangka Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus ASPI mencakup enam (6) aspek strategis dan operasional, sebagai berikut:

1. Peran ASPI Sebagai Lembaga Standar Sistem Pembayaran Nasional
2. Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Standar Nasional Sistem Pembayaran
3. Perumusan dan Penerbitan Ketentuan ASPI (KASPI)
4. Perkembangan Keanggotaan
5. Pengelolaan Keuangan ASPI
6. Penyusunan Rencana Strategis ASPI 2020-2025 sebagai Respon Kolaborasi Industri terhadap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia.

Seluruh aspek strategis operasional tersebut telah dilaksanakan oleh ASPI dengan baik, berkat dukungan penuh para anggota ASPI dan tim Bank Indonesia.



Anggoro Eko Cahyo
Ketua Umum

Peran ASPI Sebagai Penyelenggara Lembaga Standar Sistem Pembayaran Nasional

Pengelolaan Fungsi *Key Management*

Dalam tahun 2020, sebagai bagian dari tugas pengelolaan National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICSS) dan sekaligus untuk meningkatkan keamanan pada kartu ATM dan/atau kartu Debet, ASPI telah berhasil menyelesaikan proses pengambilalihan Fungsi *Key Management* dari Forum Prinsipal yang terdiri dari 3 perusahaan switching yaitu PT Rintis Sejahtera, PT Alto Network, dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik. Dengan telah terlaksananya pengalihan ini, maka ASPI telah dapat beroperasi secara penuh sebagai Certificate Authority (CA) mulai October 2020, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pengembangan Fitur *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*

Melanjuti keberhasilan awal standar nasional QR Code (QR Code Indonesia Standard - QRIS) yang dikembangkan dengan metode *Merchant Presented Mode* (QRIS MPM), maka dalam tahun 2020 ASPI telah berupaya mengembangkan QRIS ke tahap berikutnya dengan menggunakan metode *Consumer Presented Mode* (QRIS CPM). QRIS CPM yang telah diuji coba secara terbatas oleh anggota ASPI diharapkan akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi konsumen dalam bertransaksi di era digital.

Disamping QRIS CPM, dalam tahun 2020 ASPI juga, bersama-sama dengan Bank Indonesia dan anggota ASPI selaku pelaku industri pembayaran, melakukan Pengembangan dan persiapan yang diperlukan agar QRIS dapat digunakan untuk bertransaksi lintas negara (*Cross Border*). Penambahan fitur pada QRIS yang juga dilakukan dalam tahun pelaporan diharapkan dapat memperkaya fungsi QRIS sebagai kanal pembayaran tidak hanya terbatas pada Transaksi pembelian melainkan juga dapat digunakan untuk Transaksi Transfer, Tarik tunai dan Setor (TTS).

QRIS dinilai sebagai solusi yang inovatif dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan peningkatan inklusi keuangan. Hal ini terbukti dengan diberikannya penghargaan internasional dari Central Bank Publication, yang merupakan lembaga kebijakan publik dan pasar finansial internasional, kepada Bank Indonesia

Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Standar Nasional Sistem Pembayaran

Dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi, ASPI terus mendorong penggunaan QRIS MPM, lewat upaya pendampingan dan pemberian bantuan untuk mengimplementasikan QRIS MPM sebagai layanan bagi konsumen dan *merchant*.

Lebih jauh, ASPI juga telah menerbitkan buletin mengenai tampilan *image* logo QRIS sebagai acuan teknis bagi para pelaku industri pembayaran yang menggunakan standar QR

Code nasional QRIS. Hal ini diperlukan untuk menyeragamkan tampilan QRIS MPM di berbagai media secara konsisten agar lebih mudah dikenali dan diterima secara luas oleh konsumen, sehingga slogan "Satu QRIS untuk Semua" dapat tersampaikan dan tersosialisasikan dengan baik. Penyusunan bulletin ini mendapat dukungan Bank Indonesia dan masukan dari anggota ASPI yang duduk dalam Working Group QRIS Komunikasi. Melalui bulletin ini, diharapkan konsep interoperabilitas dan interkoneksi bisa diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya dapat memperluas akseptasi QRIS secara nasional.

Sebagai usaha untuk lebih mempopulerkan dan memberikan pemahaman mengenai QRIS, ASPI telah melakukan beberapa sosialisasi melalui media elektronik. Pemanfaatan media digital seperti melalui webinar dan sarana virtual meeting lainnya menjadi alternatif untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi sepanjang tahun 2020. ASPI juga menjadi nara sumber dalam berbagai forum sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, anggota ASPI dan lembaga terkait lainnya.

Perumusan dan Penerbitan Ketentuan ASPI (KASPI)

Untuk mengurangi resiko terhadap transaksi fraud sertamendorong percepatan migrasi kartu ATM dan/atau Debet berbasis *magnetic stripe* ke kartu berteknologi Chip NSICCS, ASPI telah menyusun Ketentuan ASPI (KASPI) tentang Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*). Tujuan penerbitan ketentuan ini adalah untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang dipalsukan pada perangkat ATM atau EDC.

KASPI *Liability Shift* ini telah didiskusikan dengan berbagai pelaku industri seperti penerbit, *acquirer*, Lembaga *Switching*, dan Prinsipal Internasional, yang terlibat dalam Komite APMK ASPI dan diharapkan dapat diterapkan dalam waktu dekat setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Selain penyusunan ketentuan baru, ASPI juga aktif berpartisipasi dalam berbagai acara untuk mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan ASPI yang telah diterbitkan sebelumnya, antara lain KASPI BI-RTGS, SKN BI dan warkat debit.

Perkembangan Keanggotaan

Pada akhir tahun 2020, jumlah anggota ASPI meningkat 8% dari tahun 2019, menjadi 161 anggota. Dari 13 anggota baru tersebut, sebagian besar merupakan institusi non-perbankan. Dalam periode ini, juga terdapat pengurangan 1 anggota yang disebabkan oleh penghentian operasional institusi yang bersangkutan di Indonesia. Perkembangan keanggotaan ini sesuai dengan perkembangan teknologi pembayaran digital

dan visi bersama meningkatkan inklusivitas finansial dan perekonomian Indonesia.

Pengelolaan Keuangan ASPI

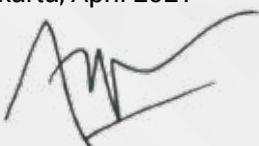
Dari segi keuangan, sepanjang 2020 ASPI membukukan pendapatan sebesar Rp21,02 miliar, relatif menurun dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp22,8 miliar. Sumber utama pendapatan tetap berasal dari alokasi MDR fee dan iuran keanggotaan dimana terjadi 13.7% penurunan pendapatan MDR fee dari Rp12,4 miliar ditahun 2019 menjadi Rp10,7 miliar ditahun 2020 sebagai dampak dari pandemi. Sedangkan untuk pengeluaran, terjadi kenaikan dari Rp11,43 miliar ditahun 2019 menjadi Rp15,48 miliar, hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya SDM dan ASPI mulai memperhitungkan biaya Imbal Pasca Kerja ditahun 2020. Dalam hal pengelolaan keuangan selama tahun 2020, ASPI tetap berpegang pada prinsip kemandirian, professional, akuntabilitas dan efisiensi secara berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis ASPI 2020-2025 sebagai Respon Kolaborasi Industri terhadap Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia

Sesuai dengan peran ASPI sebagai SRO, yang merupakan Voice of Industry, dan mitra strategis Bank Indonesia dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang semakin meningkat, maka dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia untuk memajukan ekosistem pembayaran digital dan inklusivitas ekonomi, ASPI telah dan akan membangun fondasi strategis sebagai berikut:

- a. Badan Pengurus ASPI dengan bantuan konsultan international independen, telah menyusun Rencana Strategis ASPI 2020-2025 sesuai dengan kebutuhan/aspirasi pelaku industri sistem pembayaran Indonesia, *global leading practices*, dan tata Kelola industri yang baik. Rencana Strategis ASPI tersebut telah dipresentasikan kepada Bank Indonesia dalam rangka menciptakan sinergi dan akselerasi pencapaian visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 Bank Indonesia sesuai tata kelola industri yang baik.
- b. Penguatan Organisasi dan Tata Kelola ASPI secara berkesinambungan. Berdasarkan Rencana Strategis ASPI 2020-2025 dan BSPI 2025 Bank Indonesia, ASPI

Jakarta, April 2021



Anggoro Eko Cahyo
Ketua Umum

telah meletakkan landasan strategis bagi penguatan fungsi, fokus dan prioritas struktur organisasi dan tata kelola organisasi ASPI. Termasuk dalam hal ini, proses penguatan kapasitas Komite ASPI yang akan menjadi bagian integral dan mitra strategis Working Group Bank Indonesia – ASPI/Industri berdasarkan 5 (lima) inisiatif strategis Bank Indonesia: Open Banking, Sistem Pembayaran Retail, Infrastruktur Pasar Keuangan, Data, dan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan.

ASPI juga terus memperkuat kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, dengan menambah 2 Direktur Executive dan merekrut karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan seperti di bidang *risk/fraud management, branding/communication, technical* serta *legal/compliance* untuk mendukung pelaksanaan seluruh program kerja ASPI.

Apresiasi dan Penutup

Saya mewakili Badan Pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota ASPI atas segenap kerjasama, dukungan dan kontribusi yang memungkinkan pencapaian optimal program ASPI selama tahun 2020.

Penghargaan serupa juga kami sampaikan kepada Tim Pelaksana Operasional ASPI atas segenap kerja keras dan dedikasi dalam melaksanakan program ASPI dan melayani kebutuhan segenap anggota ASPI sesuai tata kelola industri yang baik.

Badan Pengurus juga menyampaikan penghargaan kepada Badan Pengawas ASPI atas arahan dan pengawasan kepada Badan Pengurus, sehingga ASPI mampu mempertahankan kapasitas dan kinerja, bahkan terus berkembang melewati tantangan di tahun 2020.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada Bank Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada ASPI, dan dukungan penuh dalam memperkuat peran ASPI sebagai SRO dan mitra strategis Bank Indonesia. Saya yakin ASPI akan terus memberikan kontribusi secara optimal dan berkomitmen penuh untuk mendukung pencapaian visi Bank Indonesia guna mewujudkan sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, aman, dan andal, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para anggota dan masyarakat Indonesia.





PROFIL ASPI





SEKILAS ASPI

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (“Asosiasi”) atau ASPI yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM No. 10 tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 28 Oktober 2011.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri sistem pembayaran, dibutuhkan ketentuan/peraturan yang tepat, cepat dan mampu mengakomodir perkembangan terkini dari penyelenggaraan sistem pembayaran dari berbagai sisi baik bisnis maupun teknis. Di satu sisi, Bank Indonesia selaku otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara menyeluruh di Indonesia. Di sisi lain, pihak industri memiliki kompetensi terkait dengan aspek mikro dan teknis penyelenggaraan sistem pembayaran yang diantaranya teknologi informasi dan infrastruktur.

Untuk mendukung terciptanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, industri sistem

pembayaran sebagai pihak yang lebih memahami kebutuhan dan kepentingan pasar, perlu berperan aktif. Peran aktif tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk suatu organisasi yang merepresentasikan seluruh pelaku sistem pembayaran dan menjadi mitra Bank Indonesia dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur, menjaga kelancaran, dan mengembangkan sistem pembayaran.

Organisasi ini memiliki peran, tugas, dan fungsi dalam lingkup mikro dan teknis untuk membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mawadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia. Peran, tugas dan fungsi yang dimiliki organisasi untuk mengeluarkan ketentuan tersebut didasarkan pada kesepakatan, amanat dan mandat dari pelaku sistem pembayaran yang menjadi anggota organisasi.

VISI DAN MISI ASPI

VISI

Meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman dan andal.



MISI

1 Menjadi Self Regulatory Organization dalam membangun sistem pembayaran nasional yang independen dan terpercaya.

2 Menjadi mitra profesional bagi Bank Indonesia.

3 Menjadi wadah aspirasi bagi industri sistem pembayaran nasional.

4 Menyusun ketentuan mikro dan teknis sistem pembayaran nasional.

5 Berperan aktif dalam percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia



PERAN DAN KOMITMEN ASPI

- Sebagai Self Regulatory Organization yang merupakan representasi pelaku industri sistem pembayaran sekaligus mitra strategis BI, ASPI berkomitmen untuk mendukung implementasi transformasi digital sesuai visi Bank Indonesia yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.
- ASPI sebagai representasi industri sistem pembayaran memberikan masukan secara profesional, independen, konstruktif, dan kritis dengan perspektif holistik kesinambungan ekosistem pembayaran digital yang resilien, efisien dan inovatif sesuai Visi ASPI, Industry Good Governance, dan Visi Regulator.



Action

Terlibat secara proaktif dalam menyusun standar, merumuskan rencana aksi, dan berkolaborasi dalam implementasi rencana aksi untuk mengakselerasi terwujudnya pembayaran digital yang universal dan inklusif



Awareness

Bertindak proaktif dalam merancang paket sosialisasi informasi dan kajian potensi dampak/manfaat bagi pelaku industri/anggota ASPI dan memberikan edukasi masyarakat bekerjasama dengan anggota ASPI

Advocacy

Merupakan representasi 'suara' industri dan melindungi kepentingan anggota ASPI dalam konteks mewujudkan Visi Sistem Pembayaran Nasional yang berkesinambungan secara efektif sesuai dengan meningkatkan resiliensi dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, *international leading practices* dan tata kelola industri yang baik

PROFIL BADAN PENGAWAS



Diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas ASPI yang mewakili Perhimpunan Bank-Bank Nasional (PERBANAS) untuk periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai Wakil Menteri di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk periode 2016 – Oktober 2019, sebagai Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero), Tbk periode 2015 – 2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2014 – 2015, dan Presiden Direktur dan CEO di Indonesia Infrastructure Finance periode 2011 - 2013.

Beliau meraih gelar MBA dari Erasmus University, Rotterdam pada tahun 2001. Selain itu beliau juga memiliki sertifikasi program Refreshment untuk Sertifikasi Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017 dan sertifikasi Manajemen Risiko level 5 dari lembaga yang sama pada tahun 2015.

Kartika Wirjoatmodjo

Ketua



Merupakan anggota ASPI yang mewakili Perkumpulan Bank-Bank Asing Indonesia (PERBINA) periode 2019 – 2022. Beliau menjabat sebagai CEO Citibank N.A Indonesia. Dalam perjalanan karirnya di Citi, pernah menjabat sebagai CEO untuk Citi Filipina dan Citi Regional Head untuk Filipina dan Guam periode 2013 – 2015, sebagai CEO Citi Hungaria periode 2007 - 2013 dan Regional Head untuk 12 negara Eropa Timur lainnya periode 2008 - 2013. Beliau meraih gelar Bachelors of Science dari Case Western Reserve University pada tahun 1983, gelar MSc dari Steven's Institute of Technology pada tahun 1984, serta gelar MBA dari St John's University pada tahun 1988

Batara Sianturi

Anggota



Diangkat sebagai anggota Badan Pengawas untuk periode 2019 – 2022. Saat ini Beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. sejak Februari 2021. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank BNI Syariah (2017-2021), Head of Subsidiaries Company BNI pada tahun 2016, sebagai Senior Executive Vice President (SEVP) Business Risk PT Bank BNI Persero Tbk. pada tahun 2015, sebagai Head of International Division BNI pada tahun 2011, sebagai Head of Treasury Division BNI pada tahun 2010, dan sebagai GM BNI Tokyo periode 2008 - 2010. Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1988, gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1989, dan mengambil program Doktorat dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2007. Selain itu juga aktif menjadi narasumber public lecturer di berbagai Universitas serta menjadi assessor untuk sertifikasi Manajemen Risiko level 5

Abdullah Firman Wibowo
Anggota



Diangkat sebagai anggota Badan Pengawas untuk periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jateng. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 - 2017 dan sebagai Direktur Utama Bank BPD DIY periode 2008 - 2014. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari University of Dallas, USA Jurusan International Management pada tahun 1991 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2000.

Supriyatno
Anggota



Diangkat sebagai anggota Badan Pengawas untuk periode 2018-2021. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau biasa disebut Bank BRI. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur BRI (2019), Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) (2017-2019), Wakil Direktur Utama BRI (2015-2017), Direktur Comercial & Business Banking Bank Mandiri (2010-2015). Beliau meraih gelar Sarjana Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1998), dan Magister Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia (2002). Selain itu, beliau juga memperoleh beberapa Pendidikan profesional, antara lain Geopolitic Risk Related to Asia, International Risk Management Refreshment Program, National Chengchi University, Taipei Taiwan and IBI and UGM (2018); Systemic Operational, and Infrastructure Risk Management, Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy and Erasmus University (2016); Decision Making for Leaders-Melbourne University, Australia (2014); Leadership, Strategy and Implementation-Kellogg School of Management, Northwestern University-Evaston, Illinois-USA (2013); High Performance Leadership-The IMD-Lausanne, Switzerland (2012); Strategic Business Leadership: Engagement, Performance & Execution-University of Chicago-Graduate School of Business, USA (2011); Market Driving Strategies-London Business School, UK (2019); Creative Strategic Thinking for Innovation-Australian Graduates School of Management, University of New South Wales, Sydney Australia (2008).

Sunarso
Anggota

PROFIL BADAN PENGURUS



Diangkat sebagai Ketua Umum untuk periode 2019 – 2022. Beliau diangkat menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada bulan Februari 2020 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan sejak 22 Februari 2021. Dalam perjalanan karirnya di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan periode 2018 – 2019 dan sebagai Direktur Konsumer Banking periode 2015 – 2018. Beliau meraih gelar Insinyur Bidang Teknik dan Manajemen Industri dari Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1992 dan gelar Master Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002.

Anggoro Eko Cahyo
Ketua Umum



Merupakan Wakil Ketua Umum untuk periode 2019 - 2022. Sejak 26 April 2021 beliau menjabat sebagai komisaris PT. Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Dalam perjalanan karirnya di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, pernah menjabat sebagai Direktur IT periode 2018 – 2021, sebagai Direktur Digital Banking & Technology periode 2016 – 2018, dan sebagai SEVP Transaction Banking periode 2013 – 2016. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992

Rico Usthavia Frans
Wakil Ketua Umum



Diangkat sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Konsumer di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode April 2016 – Oktober 2017, dan sebagai Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk periode Desember 2014 – April 2016. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran pada tahun 2001.

Handayani
Sekretaris Jenderal



Menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal untuk periode 2020 – 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Komite 7 yang mengelola standard NSICCS. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Bank Central Asia, Tbk, aktif dalam kepengurusan Badan Eksekutif AKKI, serta Ketua Bidang Penelitian, Studi & Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Head of Pension Funding BCA di Dana Pensiun BCA periode Juli 2003 – April 2016, sebagai VP Organization Development di Indonesia Marketing Association (IMA) periode Maret 2013 – Maret 2015, sebagai Komisaris di PT Abacus Cash Solution (Anak Perusahaan Dana Pensiun BCA) periode Oktober 2013 – Mei 2016, dan anggota Komite ADPI di Asosiasi Dana Pensiun Indonesia periode Juni 2013 – April 2016. Beliau meraih gelar Magister jurusan Teknologi Industri dari Universitas Trisakti pada tahun 1989.

Santoso Liem
Wakil Sekretaris Jenderal



Diangkat sebagai Bendahara untuk periode 2019 – 2022, dan mengajukan pengunduran diri sebagai bendahara ASPI sejak tanggal 13 September 2020. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Bank BNI (Persero) Tbk.pada Feb-Sep 2020 dan menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bank DKI, Plt Direktur Utama PT Bank DKI periode Oktober 2018 - Juli 2019, sebagai Direktur Keuangan PT Bank DKI periode Juni 2015 – Oktober 2018, dan sebagai Senior Vice President Divisi Penganggaran & Pengendalian Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk periode Maret 2012-Juni 2015. Beliau meraih gelar Sarjana Geografi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas yang sama pada tahun 1997. Selain itu beliau juga memiliki Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance dari LSPP & BNSP pada tahun 2019 dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - Cyber Security Awareness In Industry 4.0 dari LSPP pada tahun 2019.

Sigit Prastowo
Bendahara



Diangkat sebagai Wakil Bendahara untuk periode 2020– 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Komite 4 yang menangani Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) serta Direktur PT Eka Bakti Amerta Yoga Sejahtera (Penyelenggara Transfer Dana bukan Bank)

Eddy Hadiyanto
Wakil Bendahara



Diangkat sebagai Ketua Komite 1 untuk periode 2020– 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Komite 5 yang menangani e-Banking. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Information Technology Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejak 15 Maret 2021. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Chief Operations, and Technology Officer di Singapore Exchange/SGX periode 2012 – 2016, sebagai Managing Direktur Teknologi dan Operasional Bank Permata, Head of Wholesale Banking Operations Global Shared Service Centre Standard Chartered Bank India, Global Head of Trade Services ANZ Australia dan Head of Global Clients Standard Chartered Bank Singapore. Beliau meraih gelar Bachelor of Business Administration jurusan Akuntansi & Keuangan dari Texas A&M University

Timothy Utama

Ketua Komite 1 (Open Banking)



Merupakan Ketua Komite 2 untuk periode 2020 – 2022. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Corporate Strategy & Development PT Rintis Sejahtera serta aktif sebagai Ketua Asian Payment Network (APN) periode 2017 – 2019. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Head of Finance Services di PricewaterhouseCoopers Consulting periode 1993 – 2002. Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung dan gelar MBA dari Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma, USA.

Abraham Josef Adriaansz

Ketua Komite 2 (Sistem Pembayaran Ritel)



Merupakan Ketua Komite 3 untuk periode 2019 – 2022. Keterlibatan beliau di ASPI mulai dari tahun 2012 sebagai anggota kemudian menjadi Ketua Komite 1 yang menangani RTGS, SKN, Tansfer Valas, BI S4. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operation & IT di PT. Bank Harda Internasional Tbk sejak 1 Februari 2021. Dalam perjalanan karirnya beliau pernah menjabat sebagai Head Of Projects & System Development (Ops) di PT Bank Permata Tbk pada tahun 2003-2011 dan sebelum menjabat sebagai Direktur Operation & IT di PT. Bank Harda Internasional Tbk, beliau pernah bergabung di Bank mega tbk sebagai Credit, Trade & Treasury Process Development Head, dengan berbagai penugasan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Transformation Project.

Ari Yanuanto Asah

Ketua Komite 3 (Infrastruktur & Sistem Pembayaran)



Diangkat sebagai Ketua Komite 4 untuk periode 2020 – 2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Bendahara ASPI. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bank Sinarmas. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Capital Indonesia pada tahun 2013, sebagai Advisor Bank Capital Indonesia pada tahun 2012, dan sebagai Direktur di MNC Finance periode 2004 – 2012.

Soejanto Soetjijo

Ketua Komite 4 (Data dan Keamanan)



Menjabat sebagai Ketua Komite 5 bidang Regulasi/Kebijakan/Prosedur untuk periode 2020-2023. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun di industri perbankan dan lembaga keuangan dan saat ini bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di Citibank Indonesia. Beliau memulai karirnya sebagai Senior Team Leader Sales and Marketing Department untuk GE Capital Indonesia, dan selanjutnya meniti karier sebagai Associate Manager di Ernst & Young Indonesia, Manajer Audit Internal di The Royal Bank of Scotland dan Barclays Indonesia, Kepala Audit Wholesale, Auto dan Anak Perusahaan di Bank CIMB Niaga, dan selanjutnya bergabung di Citibank Indonesia. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari University of Birmingham, Inggris dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia.

Ardhi Wibowo

Ketua Komite 5 (Regulasi/Kebijakan/Prosedur)

DIREKTUR EKSEKUTIF



Diangkat sebagai Direktur Eksekutif ASPI dengan tanggung jawab mengkoordinasikan berbagai kegiatan ASPI. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai SEVP Digital Banking dan Consumer Lending Bank Danamon sejak tahun 2010 dan memulai kariernya di Consumer Banking Citibank sejak tahun 1990. Beliau menyelesaikan Pendidikannya di Universitas Padjajaran, Bandung dan memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada tahun 1986 serta memperoleh gelar MBA dari Universitas Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Djamin Edison Nainggolan
Direktur Eksekutif



Menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASPI untuk menangani kegiatan Operasional dan kegiatan yang berhubungan dengan Infrastruktur Sistem Pembayaran. Mempunyai pengalaman yang ekstensif di perbankan. Dalam perjalanan karirnya di HSBC, beliau pernah menjabat sebagai Senior Vice President & Head of Securities Services, sebelumnya beliau juga pernah mengepalai divisi Financial Institution Group, serta pernah menjabat sebagai komisaris di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Susiana Suhendra
Direktur Eksekutif



Menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASPI untuk menangani data, pengaturan, perizinan dan perencanaan serta member engagement. Sebelum bergabung di ASPI, beliau berkarir di Bank of America NA. Indonesia sebagai Head of Fulfilment, Service dan Operations. Beliau juga pernah bergabung di PT. Bank Negara Indonesia sebagai Project Manager untuk Integrated Data Management, Group Head di Divisi Transactional Banking dan di Divisi Perencanaan Strategis serta Divisi Teknologi Informasi. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil dan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, serta doktoral di bidang Strategic Management dari Universitas Trisakti.

Yanti Pusparini
Direktur Eksekutif





PERKEMBANGAN ORGANISASI

PERKEMBANGAN ORGANISASI

Keanggotaan ASPI

Hingga Desember 2020, ASPI memiliki 161 anggota atau meningkat 8%, dari tahun 2019 yang berjumlah 149 anggota. Peningkatan ini mencerminkan keberadaan ASPI yang semakin kuat dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya industri perbankan dan sistem pembayaran di Indonesia.

Anggota ASPI terdiri dari bank dan institusi non-bank antara lain perusahaan *Financial Technology* (Fintech), Prinsipal, Lembaga *switching*, perusahaan Telekomunikasi, *Central Depository*, serta institusi lain yang terkait dengan sistem pembayaran di Indonesia.

Berikut adalah institusi yang menjadi anggota ASPI di tahun 2020:

1. PT Astra Digital Arta
2. PT Cashlez Worldwide Indonesia
3. PT Paprika Multi Media
4. PT Duta Teknologi Kreatif
5. PT Rpay Finansial Digital Indonesia
6. PT Jatelindo Perkasa Abadi
7. PT Max Interactive Technology
8. PT Sarana Pactindo
9. PT Witami Tunai Mandiri
10. PT MNC Teknologi Nusantara
11. PT Netzme Kreasi Indonesia
12. PT Sprint Asia Technology
13. PT Bank Jago

Dari 13 anggota baru ASPI di atas, 12 diantaranya adalah perusahaan Fintech, dan 1 dari perbankan. Di periode yang sama, ada 1 bank yang menghentikan operasionalnya di Indonesia, yaitu PT Rabobank Indonesia. Maka, posisi keanggotaan ASPI per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Anggota Biasa : 138
- Anggota Afiliasi : 23

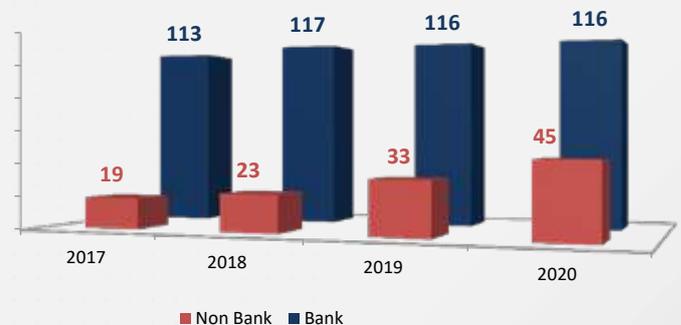
Posisi Keanggotaan ASPI



Berdasarkan kategori:

- Bank : 116
- Non Bank : 45

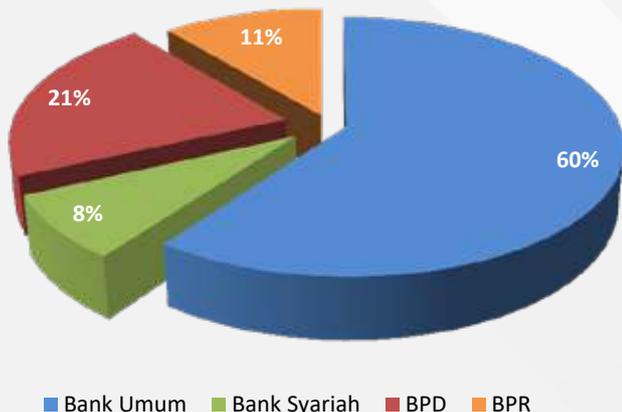
Kategori Keanggotaan ASPI



Rincian keanggotaan dari perbankan sebagai berikut:

- Bank Umum : 70
- BPD : 9
- BPR : 24
- Bank Syariah : 13

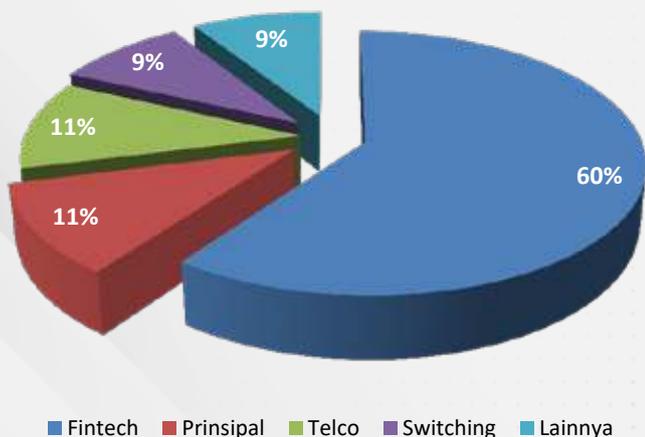
Komposisi Bank dalam Keanggotaan ASPI



Rincian Keanggotaan non bank sebagai berikut:

- Fintech : 27
- Principal : 5
- Selular/ Telco : 5
- Switching : 4
- Lainnya : 4

Komposisi Non Bank dalam Keanggotaan ASPI



Komite ASPI

Berdasarkan Rapat Umum Anggota (RUA) ASPI tanggal 14 Agustus 2020, para Anggota ASPI telah menyetujui perubahan pada komite ASPI dari yang awalnya berjumlah 7 Komite menjadi 5 Komite. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang akan diterapkan oleh Bank Indonesia. Berikut Kronologis perubahan struktur ASPI di tahun 2020.

Kronologis Perubahan Struktur ASPI Tahun 2020

Sebelum RUA 14 Agustus 2020 (Struktur Lama)	Setelah RUA 14 Agustus 2020 (Struktur Baru)
Komite 1: RTGS, SKN, Tanfer Valas, BI S4	Komite 1: Open Banking
Komite 2: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	Komite 2: Sistem Pembayaran Ritel
Komite 3: eMoney	Komite 3: Infrastruktur & Sistem Pembayaran
Komite 4 : Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)	Komite 4: Data & Keamanan
Komite 5: eBanking	Komite 5: Regulasi / Kebijakan / Prosedur
Komite 6: Infrastruktur & Teknologi Sistem Pembayaran	
Komite 7: Pengelola Standar NSICCS	

Kepengurusan ASPI

Di tahun 2020, kepengurusan ASPI juga mengalami perubahan. Berdasarkan Rapat Umum Anggota (RUA) ASPI yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2020, susunan kepengurusan ASPI adalah sebagai berikut:

Badan Pengawas ASPI 2020

Nama	Jabatan
Kartika Wirjoatmodjo	Ketua
Batara Sianturi	Wakil Ketua Umum
Abdullah Firman Wibowo	Anggota

Nama	Jabatan
Supriyatno	Anggota
Sunarso	Anggota



Badan Pengurus ASPI 2020

Nama	Jabatan
Anggoro Eko Cahyo	Ketua Umum
Rico Ustha via Frans	Wakil Ketua Umum
Handayani	Sekretaris Jenderal
Santoso Liem	Wakil Sekretaris Jenderal
Sigit Prastowo	Bendahara
Eddy Hadiyanto	Wakil Bendahara

Nama	Jabatan
Timothy Utama	Ketua Komite 1
Abraham Josef Adriaansz	Ketua Komite 2
Ari Yanuanto Asah	Ketua Komite 3
Soejanto Soetjjo	Ketua Komite 4
Ardhi Wibowo	Ketua Komite 5



DIREKTUR EKSEKUTIF



PELAKSANA OPERASIONAL







KEGIATAN ASPI TAHUN 2020

LAPORAN KEGIATAN ASPI 2020

Sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO) dalam industri sistem pembayaran Indonesia, ASPI memiliki peran, tugas, dan fungsi dalam membangun ekosistem pembayaran yang terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ASPI memiliki serangkaian program kegiatan yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2020, antara lain meliputi:

1. Key Management dan Certificate of Authority (CA)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, ASPI sebagai Lembaga Standar, memiliki tugas antara lain yaitu menjalankan dan mengelola fungsi *key management* sebagai CA (*Certificate Authority*). Adapun persiapan dan kegiatan yang dilakukan ASPI sebagai pelaksana fungsi *Key Management* adalah sebagai berikut;

- Pengadaan dan membangun Sistem CA (mempersiapkan *hardware & software*)
- Manyelenggarakan uji coba/sistem *test* (UAT) dengan mengikutsertakan perwakilan industri
- Menyusun prosedur CA Key untuk internal ASPI dan bank-bank
- Restore key* CA (yang diambil alih dari Forum Prinsipal) dan validasi *Issuer Public Key Certificate* (IPKC)
- Melakukan pelatihan yang diperlukan
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara ASPI dengan Forum Prinsipal sebagai pengalihan fungsi CA.
- Pemberitahuan kepada bank-bank mengenai pengalihan fungsi CA dari Forum Prinsipal PT Alto Network, PT Artajasa, dan PT Rintis kepada ASPI yang akan mulai dioperasikan pada November 2020.

Selama bulan November dan Desember 2020, ASPI telah menerima permintaan penerbitan *Issuer Public Key Certificate* IPKC dari bank sebanyak 26 bank dan per akhir Desember telah menerbitkan 11 sertifikat.

2. QRIS CPM (*Consumer Presented Mode*)

QRIS MPM (*Merchant Presented Mode*) mulai

diimplementasikan pada tahun 2019, dan masih terus dikembangkan hingga saat ini. Di tahun 2020, ASPI bersama dengan industri dan didukung oleh Bank Indonesia mulai mengembangkan QRIS dengan mode CPM (*Consumer Presented Mode*). QRIS CPM ini sudah diuji terbatas (oleh pilot Bank) secara bersama yang dilakukan pada saat ASPI *Executive Gathering* di Bali pada Februari 2020. Saat itu, Gubernur Bank Indonesia berkesempatan melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan metode QRIS CPM di 40 (empat puluh) merchant yang berpartisipasi.

Proses pengujian QRIS CPM ini berlangsung di sepanjang tahun 2020 melalui sandbox. Peserta QRIS CPM yang mengikuti uji coba melalui sandbox berjumlah 13 PJSP dan jumlah merchant sebanyak ± 1.000 dengan total volume transaksi sejumlah 1 juta transaksi, dan total Nilai transaksi sebesar Rp74,1 milyar.

Dari hasil uji tersebut, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian spesifikasi yang memudahkan user atau pengguna. Uji coba Sandbox QRIS CPM ini ditargetkan selesai pada Q1 2021, dan akan diterapkan secara luas pada Q2 2021 sesuai ketetapan Bank Indonesia.

3. QRIS Cross Border

ASPI berpartisipasi aktif dalam berbagai diskusi untuk membangun kerjasama dalam transaksi pembayaran lintas negara (*Cross Border*) dengan menggunakan QRIS atau disebut QRIS *Cross Border*. Untuk tahap awal, ASPI akan bekerja sama dengan negara Malaysia dan Thailand untuk penerapan QRIS *Cross Border* ini.

Di tahun 2020, ASPI sedang mempersiapkan uji coba transaksi QRIS *Cross Border* yang akan diikuti oleh 12 PJSP peserta. *Piloting project* ini diharapkan dapat dilakukan di tahun 2021.

4. QRIS TTS (*Transfer, Tarik Tunai, & Setor*)

Untuk memaksimalkan manfaat QRIS, ASPI mengembangkan fitur QRIS lain yang dapat memfasilitasi transaksi Transfer, Tarik Tunai dan Setor Tunai (TTS). Oleh karena itu, sejak Agustus 2020, ASPI

SATU UNTUK SELURUH PEMBAYARAN



Disponsori Oleh :  **ASPI**
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Didukung Oleh :  **BANK INDONESIA**
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

bersama dengan beberapa perwakilan anggotanya mulai melakukan pengembangan fitur QRIS TTS ini dan telah berhasil melakukan *test Proof of Concept* di bulan November 2020 dengan target ujicoba *sandbox*.

Ke depannya, diharapkan QRIS tak hanya menjadi alat pembayaran tetapi juga mampu melakukan transaksi perbankan lainnya. Transaksi QRIS TTS ini ditargetkan akan diimplementasikan pada tahun 2021.

5. Sosialisasi QRIS

a. QRIS MPM (*Merchant Presented Mode*)

Untuk mendorong penggunaan QRIS MPM, ASPI telah melakukan pendampingan dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada calon PJSP QRIS untuk dapat mengimplementasikan QRIS MPM sebagai layanan untuk konsumen dan *merchant*.

b. Tampilan QRIS

Untuk menyeragamkan Tampilan QRIS MPM secara konsisten dan mudah dikenali, ASPI senantiasa melakukan sosialisasi melalui media elektronik dan juga dengan menerbitkan Buletin yang menampilkan image logo QRIS. Kehadiran Buletin ini sebagai bentuk komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan ASPI agar kehadiran QRIS dapat diterima oleh masyarakat luas, sesuai dengan slogan QRIS, "SATU QRIS UNTUK SEMUA". Selain itu, Buletin ini juga menjadi edukasi ASPI kepada *merchant* sehingga kehadiran QRIS dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia dan digunakan secara nasional.

6. Standardisasi Open API

Untuk mendukung pelaksanaan VISI kedua dan ketiga Bank Indonesia seperti yang tercantum dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025, ASPI telah membentuk sub Working Group (WG) Open API yang merupakan bagian dari WG Nasional Open API Bank Indonesia. Sub WG Open API dibagi dalam dua kelompok yaitu sub WG Teknis Standar dan sub WG Tata Kelola dimana anggotanya merupakan wakil dari industri sistem pembayaran yang terdiri dari 16 (enam belas) institusi pelaku utama Bank dan Non-Bank termasuk *ecommerce* dan *payment gateway*.

Kick off Penyusunan Open API dan pembentukan sub WG diselenggarakan pada 16 Juni 2020 dan kini, secara

intensif ASPI telah mengoordinasikan lebih dari 100 (seratus) pertemuan regular untuk membahas Standar Spesifikasi dan Standar Tata Kelola. Draft Standar Spesifikasi Open API dan draft Standar Pedoman Tata Kelola telah disampaikan ke Bank Indonesia pada Desember 2020.

7. Ketentuan, Pedoman, dan Buletin Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

a. Ketentuan ASPI (KASPI)

Untuk mendorong percepatan penggunaan standar nasional berteknologi Chip NSICCS (*National Standard Indonesian Chip Card Specification*) ASPI telah menyusun ketentuan (KASPI) tentang Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) yang bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang dipalsukan pada perangkat ATM atau EDC.

KASPI *Liability Shift* ini telah didiskusikan dengan pelaku industri (penerbit, *acquirer*, Lembaga *Switching*, Prinsipal *International*) yang terlibat dalam Komite 2 ASPI – APMK sebelum diserahkan kepada Bank Indonesia untuk persetujuan.

Selain penyusunan ketentuan baru, ASPI juga aktif berpartisipasi dalam acara Bank Indonesia untuk mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan ASPI lain seperti KASPI SKN BI dan warkat debit.

b. Buletin ASPI (BASPI)

Buletin ASPI dikeluarkan untuk melengkapi atau melakukan penyesuaian terhadap standar Pedoman yang telah diterbitkan sebelumnya.

Dalam tahun 2020 ASPI telah mengeluarkan 3 (tiga) Buletin tentang;

- Pengecekan Data Merchant dan Pengecekan Nominal Transaksi QRIS MPM oleh Acquirer
- Notifikasi Transaksi QRIS MPM yang di keluarkan oleh PJSP kepada Merchant dan User.
- Tampilan Image Logo QRIS.

Lebih jauh, ASPI juga telah menerbitkan buletin mengenai tampilan image logo QRIS dikeluarkan sebagai acuan teknis bagi para pelaku industri pembayaran yang menggunakan standar QR Code nasional QRIS. Hal ini diperlukan untuk menyeragamkan

tampilan QRIS MPM di berbagai media secara konsisten agar lebih mudah dikenali dan diterima secara luas oleh konsumen, sehingga slogan “Satu QRIS untuk Semua” dapat tersampaikan dan tersosialisasikan dengan baik. Penyusunan bulletin ini mendapat dukungan Bank Indonesia dan masukan dari anggota ASPI yang duduk dalam Working Group QRIS Komunikasi.

Melalui buletin ini, diharapkan konsep interoperabilitas dan interkoneksi pada Transaksi QRIS bisa diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya dapat memperluas penerimaan akseptasi QRIS secara nasional.

8. Pengembangan Organisasi Internal ASPI

Sebagai mitra strategis Bank Indonesia, di tahun 2020 ASPI melakukan reorganisasi Komite dari 7 (tujuh) Komite menjadi 5 (lima) Komite. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan BSPI 2025 dan sejalan dengan pembentukan *Working Group* Bank Indonesia. Selain itu, ASPI juga memperkuat tim dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di posisi Direktur Eksekutif, Produk, Operasional dan IT.

9. Kegiatan Sertifikasi dan Rekomendasi

a. Sertifikasi NSICCS

Sertifikat yang dikeluarkan ASPI selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Sertifikasi CPT: 26 kartu CPT
- Sertifikasi Kartu: 10 produk kartu NSICCS
- Sertifikasi EDC: 12 produk EDC
- Sertifikasi Perso Biro: 2 Perso Biro

b. Pendaftaran vendor NSICCS

Selama tahun 2020 ada 6 vendor terminal yang didaftarkan

c. Pemberian Spesifikasi QRIS dan Surat Rekomendasi QRIS

Pada tahun 2020, ada 36 PJSP yang

mendapatkan spesifikasi QRIS dan 40 PJSP yang mendapatkan surat rekomendasi QRIS dari ASPI, setelah melalui proses pemeriksaan atas laporan pengujian PJSP dan laporan hasil UAT dengan Lembaga switching.

d. Persetujuan Logo GPN

Memproses dan menyetujui penerbitan kartu ATM dan Debit menggunakan logo GPN dari 14 bank.

10. ASPI Executive Gathering

ASPI menyelenggarakan *Executive Gathering* 2020 di Bali pada 29 Februari 2020 dengan tema “*Building the Trusted and Inclusive National Digital Payment System/ Membangun Sistem Pembayaran Digital Nasional yang Terpercaya dan Inklusif*”.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjiyo yang memberikan pengarahan “Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital” dan Ibu Filianingsih Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran yang memberikan paparan BSPI 2025.

11. Rapat Umum Anggota ASPI

Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan untuk tahun 2020 diadakan secara *virtual* pada 14 Agustus 2020 dan dihadiri oleh 107 anggota ASPI atau 70% dari seluruh anggota ASPI yang berjumlah 154 anggota (pada saat RUA diadakan) dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawas dan Badan Pengawas dan Pengesahan Laporan Keuangan ASPI untuk tahun buku 2019
2. Perubahan Anggaran Dasar ASPI
3. Perubahan Susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas ASPI



KILAS BALIK KEGIATAN ASPI 2020



Executive Gathering
Bali, 29 Februari 2020



Soft Launch QRIS CPM
29 Februari 2020



Rapat Umum Anggota Tahunan
2020



Executive Gathering
Bali, 29 Februari 2020



Executive Gathering
Bali, 29 Februari 2020



Serah Terima
Certificate Authority
21 Oktober 2020



Open API Kick-off
16 Juni 2020



Sosialisasi QRIS di media TV
24 Juni 2020



RENCANA KEGIATAN ASPI TAHUN 2021

RENCANA KEGIATAN ASPI 2021

Dalam rangka mendukung implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan berbagai inisiatif strategis di sistem pembayaran, ASPI berkolaborasi intensif dengan pemangku kepentingan di industri sistem pembayaran Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, ASPI telah menyusun rencana kegiatan tahun 2021 demi tercipta sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, andal dan efisien. Berikut garis besar rencana kegiatan ASPI tahun 2021:

I. Mendukung Implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025

1. *Open API Payment*

- a. Menyusun dan mengembangkan standar *Open API* pembayaran yang terdiri dari standar data, standar teknis dan standar keamanan, serta standar tata kelola (termasuk Perlindungan Konsumen, Perlindungan Data, Persyaratan Bagi Pengguna *Open API* dan Pedoman Standar Kontrak *Open API*) bersama dengan representasi anggota yang ditunjuk dalam Working Group *Open API*.
- b. Mempersiapkan *Pilot Project* dan Implementasi Tahap I bagi *first movers* sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Mensosialisasikan konsep *Open API* kepada anggota dan *stakeholders* dalam berbagai forum.

2. Sistem Pembayaran Ritel

- a. *BI Fast/IPT*; Melakukan review dan memberikan masukan kepada regulator secara proaktif sebagai representasi industri sistem pembayaran. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi diskusi dengan anggota dan regulator serta pihak terkait dalam rangka mempersiapkan pengembangan infrastruktur, sistem aplikasi dan perubahan bisnis proses terkait *BI Fast*.
- b. Melaksanakan pengembangan, testing dan uji coba yang diperlukan untuk mendukung implementasi penambahan dan perluasan fitur penggunaan QRIS (misalnya QRIS CPM, Fitur TTS (Transfer, Tarik Tunai, Setor)

dan Transaksi QR Code lintas negara/*Cross Border*)

- c. Mendukung program QRIS *Merchant Expansion* dengan target 12 juta merchant UKM dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi di berbagai forum serta melakukan review dan bersama-sama dengan regulator dan anggota menyusun rencana perbaikan agar akseptasi, interkoneksi dan interoperabilitas serta volume transaksi dan aktifitas merchant QRIS terus meningkat.

3. Infrastruktur Pasar Keuangan

Membantu mengoordinasikan anggota dalam Pengembangan *Market Infrastructure* (BI RTGS, SSSS, ETP, TR, CCP) dan memberikan masukan kepada regulator sesuai kebutuhan.

4. Data

Mendukung Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran dengan berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan pengembangan data *hub* dan memberikan masukan sesuai kebutuhan data bagi industri serta mempersiapkan MIS untuk mendukung kebutuhan internal ASPI dan anggota.

5. Peraturan

- a. Melakukan review dan menyampaikan masukan terkait PBI Payung dan Peraturan Pelaksanaannya kepada regulator sesuai fungsi sebagai representasi industri sistem pembayaran.
- b. Melakukan sosialisasi melalui diseminasi informasi terkait PBI Payung SP kepada anggota serta memfasilitasi diskusi antara anggota dengan regulator untuk mendapatkan penjelasan dan arahan lebih detail sebagai bagian dari persiapan.
- c. Mengidentifikasi peraturan dan ketentuan PBI Payung baru yang berdampak pada ketentuan teknis dan mikro serta operasional ASPI implementasi PBI Payung SP.
- d. Bersama-sama dengan regulator dan perwakilan anggota mempersiapkan

penyusunan ketentuan teknis dan mikro sesuai perubahan dalam PBI Payung SP dan peraturan turunannya.

II. Mendukung Implementasi Inisiatif Strategis di Sistem Pembayaran

1. *Contactless*

Mempersiapkan konsep dan rencana pengembangan instrumen pembayaran berbasis teknologi nirsentuh (*contactless*) termasuk memilih strategi implementasi memproses pemilihan *provider*, menyusun spesifikasi dan melakukan *testing* serta menyusun skema bisnisnya.

2. *Multi Lane Free Flow (MLFF)*

Melakukan review dan memberikan masukan atas konsep pemrosesan transaksi dan model bisnis sistem MLFF kepada Regulator dan pihak terkait agar pengembangan dan implementasi MLFF dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan nilai tambah, baik kepada penyelenggara sistem pembayaran maupun konsumen pengguna jalan tol.

3. *Review Pricing/skema harga (MDR)*

Dengan memperhatikan masukan dari *Working Group* QRIS untuk menerapkan bisnis model transaksi QRIS yang Efisien, Wajar, Adil dan berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan usaha maka ASPI mengusulkan strategi penerapan skema harga QRIS dengan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang yang menekankan pada penerapan tarif berdasarkan instrumen dengan QRIS sebagai kanal

4. Pengembangan Standar QRIS

Meningkatkan akseptansi QRIS dengan melakukan pengembangan tahap selanjutnya untuk standar berteknologi QR Code (QRIS)

- Standar spesifikasi QRIS dengan metode *Consumer Presented Mode (CPM)*
- Penambahan fitur QRIS untuk transaksi Transfer, Tarik Tunai, dan Setor (TTS)
- Penyusunan standar interkoneksi QR Code lintas negara/*Cross Border*.

III. Memberikan Nilai Tambah kepada Anggota dan Meningkatkan *Visibility* ASPI

1. *Member Engagement and Communication Program*

- Melaksanakan *Member Forum* secara *virtual* dengan topik-topik yang relevan dalam industri sesuai segmen anggota dengan melibatkan Badan Pengurus, Komite, serta *expert* dari industri
- Melaksanakan berbagai kegiatan untuk Anggota dalam *Members Forum* secara *virtual Meet and Greet* Anggota WG
- Melaksanakan *Executive Gathering*.
- Menerbitkan *Newsletter ASPI Menyapa!* dan *Berita Statistik SP* secara berkala
- Meningkatkan partisipasi aktif perwakilan ASPI dalam berbagai forum sebagai narasumber

2. Sosialisasi dan Edukasi

Mengadakan edukasi dan sosialisasi kepada anggota mengenai ketentuan dan pedoman yang dikeluarkan ASPI melalui berbagai forum dan media komunikasi.

IV. Memberikan Dukungan Berkesinambungan dalam Membangun Sistem Pembayaran yang Efisien, Aman, dan Andal

1. Key Management

- Mempersiapkan internal *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pemrosesan *key management*.
- Mengatur implementasi *new CA Key – 1984 length* dengan *expiry date* 2030 (komunikasi dengan *issuer* dan *acquirer*)

2. Ketentuan ASPI (KASPI), Pedoman ASPI (PASPI), dan Bulletin ASPI (BASPI)

- Meninjau mekanisme penyusunan dan penerbitan ketentuan yang ada, dan melakukan perubahan yang diperlukan dengan mengacu kepada PBI yang baru
- Menyusun KASPI, PASPI, dan BASPI terkait kegiatan sistem pembayaran sesuai

kebutuhan pelaku dan industri Sistem Pembayaran dengan memperhatikan masukan *Working Groups*.

3. Sertifikasi

Mempersiapkan mekanisme sertifikasi termasuk skenario pengujian untuk seluruh produk/ layanan baru yang dikembangkan, antara lain:

- *Open API*
- QRIS MPM, CPM, TTS dan *Cross Border*
- *Contactless*

V. Membangun Proses dan Kapabilitas Internal ASPI

1. Merekrut sumber daya manusia dengan kompetensi dan skill yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kerja ASPI .
2. Menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, dan kualitas karyawan ASPI melalui:
 - *Seminar/Workshop/Conference*
 - *Training Courses*
 - *Sharing session* internal
 - *Assignment/Attachment* (jika memungkinkan)

VI. Membangun Infrastruktur Sistem Teknologi Internal ASPI

Melakukan *review* dan peningkatan/penyesuaian *hardware/software* yang memadai untuk menjalankan fungsi ASPI secara lebih efisien dan efektif melalui otomasi dan penyempurnaan bisnis proses.

VII. Pengkinian Website ASPI

Dengan bertambahnya tugas, tanggung jawab, cakupan, dan aktivitas ASPI, maka ASPI perlu melakukan pengkinian dan pengembangan website ASPI untuk memudahkan anggota ASPI dan pelaku usaha sistem pembayaran dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan berita sehubungan dengan aktivitas ASPI.



LAPORAN KEUANGAN

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2020

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan – Pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
Neraca	1
Laporan Perubahan Aset Bersih	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4 – 14

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Anggoro Eko Cahyo
Alamat kantor : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
Graha Mandiri Lt 18
Jl. Imam Bonjol No 61
Alamat domisili sesuai KTP : Cimandiri V FF 3/22, Bintaro
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
Nomor telepon : (62-21) 230 1947
Jabatan : Ketua Umum

2. Nama : IR Eddy Hadiyanto MBA
Alamat kantor : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
Gedung Graha Mandiri Lt 18
Jl Imam Bonjol No 61
Alamat domisili sesuai KTP : Jl. Teluk Bayur I/2 RT11 RW17
Nomor telepon : (62-21) 230 1947
Jabatan : Wakil Bendahara

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
2. Laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Pengurus,
Jakarta, 14 April 2021



METERAI TEMPEL
D8CF0AJX162660764

Anggoro Eko Cahyo
Ketua Umum



METERAI TEMPEL
63AJX162660754

IR Eddy Hadiyanto MBA
Wakil Bendahara



Menara Kadin Indonesia 9th Floor

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 kav.2-3

Jakarta 12950 - Indonesia

Phone : (62-21) 5274426 (Hunting)

Fax : (62-21) 5274435, 8305901

E-mail : info@inpact.id

Website : inpact.id

Laporan Auditor Independen

No. 00082/2.1235/AU.2/11/1018-8/1/IV/2021

Pengurus

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2020, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjas lainnya.

Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standard Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

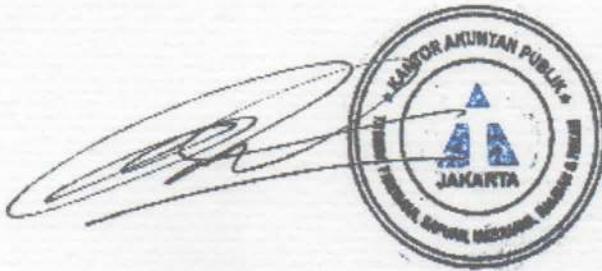
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup kuat dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini Audit

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

TASNIM, FARDIMAN, SAPUAN, NUZULIANA, RAMDAN & REKAN
No. Izin Kantor No. 642/KM.1/2018



Yana Nuzuliana, CA, CPA
Surat Izin Praktik Akuntan Publik No. AP. 1018

14 April 2021

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NERACA
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3	24.088.750.220	17.604.713.155
Piutang iuran	4	-	221.000.000
Piutang lain lain		-	555.577
Pajak dibayar dimuka	9a	5.376.709	421.636.579
Jumlah Aset Lancar		<u>24.094.126.929</u>	<u>18.247.905.311</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	5	1.279.601.234	944.675.633
Aset tak berwujud	6	2.123.821.833	806.464.834
Jaminan	7	437.076.000	430.806.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>3.840.499.067</u>	<u>2.181.946.467</u>
JUMLAH ASET		<u>27.934.625.997</u>	<u>20.429.851.778</u>
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN LANCAR			
Biaya yang masih harus dibayar	8	1.012.353.641	1.339.960.730
Hutang pajak	9b	2.345.808.051	2.533.226.711
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>3.358.161.692</u>	<u>3.873.187.441</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Liabilitas imbalan paska kerja		4.511.123.219	-
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>7.869.284.911</u>	<u>3.873.187.441</u>
ASET BERSIH		<u>20.065.341.085</u>	<u>16.556.664.337</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		<u>27.934.625.997</u>	<u>20.429.851.778</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN	10	20.450.900.319	22.393.287.941
BEBAN USAHA			
Beban proyek	11	(166.314.136)	(2.003.212.126)
Beban umum dan administrasi	12	(15.323.210.988)	(9.427.883.117)
Jumlah Beban Usaha		(15.489.525.124)	(11.431.095.243)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga		571.266.261	418.607.310
Beban lain-lain		(116.451.749)	(262.607.597)
Penghasilan lain-lain - bersih		454.814.512	155.999.713
KENAIKAN ASET BERSIH		5.416.189.707	11.118.192.411
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	9c	(1.907.512.958)	(2.458.023.193)
KENAIKAN ASET BERSIH SETELAH PAJAK		3.508.676.749	8.660.169.218
ASET BERSIH AWAL PERIODE		16.556.664.337	7.896.495.118
ASET BERSIH AKHIR PERIODE		20.065.341.085	16.556.664.337

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak	3.508.676.749	8.660.169.218
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	274.384.777	233.165.394
Amortisasi	200.323.001	150.024.875
Imbalan paska kerja	4.511.123.219	
Perubahan aset bersih:		
Piutang usaha	221.000.000	308.000.000
Piutang lain lain	555.577	228.535.332
Pajak dibayar dimuka	416.259.870	(131.119.769)
Jaminan	(6.270.000)	(12.540.000)
Hutang pajak	(187.418.660)	1.828.420.087
Beban yang masih harus dibayar	(327.607.090)	(1.575.665.979)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	<u>8.611.027.443</u>	<u>9.688.989.159</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(609.310.378)	-
Aset tak berwujud	(1.517.680.000)	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(2.126.990.378)</u>	<u>-</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	6.484.037.065	9.688.989.159
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>17.604.713.155</u>	<u>7.915.723.996</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>24.088.750.220</u>	<u>17.604.713.155</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM ASOSIASI

a. Pendirian Asosiasi

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (“Asosiasi”) disingkat ASPI dalam bahasa Inggris disebut *The Indonesia Payment System Association* di singkat IPISA didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM No. 10 tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 28 Oktober 2011, untuk didaftarkan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan akta yang telah disusun kembali oleh Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta selaku protokol dari DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM., di bawah akta No. 21 tanggal 16 Desember 2011. Akta pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-227.A.H.01.06. Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011. Anggaran Dasar mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 11 tanggal 7 Agustus 2015 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000222.AH.01.08. Tahun 2016.

Asosiasi ini memiliki peran, tugas dan fungsi membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mewadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dalam industri sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran.

Asosiasi berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Graha Mandiri Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310.

b. Ruang Lingkup Asosiasi

Ruang lingkup dan kegiatan Asosiasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien dan menyusun ketentuan yang bersifat mikro dan teknis dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
- b. Wadah bagi kepentingan segenap pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang terkait dengan hubungan antar anggota ASPI maupun hubungan ASPI dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.
- c. Mitra Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran guna mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.

c. Keanggotaan Asosiasi

ASPI beranggotakan bank dan lembaga selain bank pelaku sistem pembayaran yang berbentuk badan hukum dan telah mendapat ijin dari Bank Indonesia atau instansi yang berwenang.

Pada tahun 2020 dan 2019, Asosiasi mempunyai anggota masing-masing sebanyak 161 anggota dan 149 anggota.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM ASOSIASI (Lanjutan)

d. Susunan dan Tugas Pengurus Asosiasi

Berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, No. 62 tanggal 27 Juni 2019 dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota tanggal 27 Juni 2019 tentang Perubahan Susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Asosiasi telah didaftarkan dan disetujui oleh seluruh Anggota ASPI sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000643.AH.01.08 tanggal 26 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Ketua Umum	: Anggoro Eko Cahyo	Anggoro Eko Cahyo
Wakil Ketua	: Rico Usthavia Frans	Rico Usthavia Frans
Sekjen	: Handayani	Handayani
Wakil Sekjen	: Santoso	Abraham J. Adriaansz
Bendahara	: Sigit Prastowo	Sigit Prastowo
Wakil Bendahara	: IR. Eddy Hadiyanto MBA	Soejanto Soetjijo
Ketua Komite I	: Timothy Utama	Ari Yuanto Asah
Ketua Komite II	: Abraham J. Adriaansz	Budiman Tanjung
Ketua Komite III	: Ari Yuanto Asah	Djumariah Tenteram
Ketua Komite IV	: Soejanto Soetjijo	Eddy Hadijanto
Ketua Komite V	: Ardhi Prabowo	Timothy Utama
Ketua Komite VI	: -	YB Hariantono
Ketua Komite VII	: -	Santoso
Direktur Eksekutif	: Susiana Suhendra	Susiana Suhendra
Direktur Eksekutif	: Djamin Edison Nainggolan	-
Direktur Eksekutif	: Yanti Puspa Rini	-

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Asosiasi telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2020 disajikan berdasarkan SAK ETAP.

Manajemen Asosiasi berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2020 dengan angka komparatif 2019 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pembayaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Piutang luran

Piutang iuran disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Biaya perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur dengan model biaya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan perlengkapan kantor	4 tahun
Pengembangan ruang gedung yang disewa	8 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

e. Perpajakan

Asosiasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Asosiasi harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Asosiasi tidak mengakui adanya pajak tangguhan. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Asosiasi mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun uang pesangon, uang penghargaan dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perseroan" yang telah sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset bersih dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode Projected-unit-credit.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Ketika imbalan pasca-kerja berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode garis lurus (Straight line - method) selama rata - rata sisa masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (Vested). Imbalan pasca - kerja menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif.

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasca - kerja pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian diakui dengan menggunakan metode garis lurus selama sisa masa kerja rata rata karyawan. Jika tidak, keuntungan atau kerugian aktuarial tidak diakui.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan baik pendapatan iuran anggota maupun pendapatan lain-lain didasarkan pada akrual basis, yaitu pendapatan suatu periode diakui sebagai pendapatan walaupun belum diterima pembayaran per kas. Beban diakui pada saat terjadinya.

3. KAS DAN SETARA KAS

	2020	2019
Bank		
PT Bank Negara Indonesia	8.671.650.032	13.018.350.847
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	593.680.391	609.240.183
PT Bank Central Asia Tbk	1.280.209.169	594.675.390
Jumlah Bank	10.545.539.592	14.222.266.420
Deposito berjangka		
PT Bank DKI	12.793.954.331	2.660.220.175
PT Bank CIMB Niaga Syariah	749.256.297	722.226.560
Jumlah Deposito berjangka	13.543.210.628	3.382.446.735
Jumlah	24.088.750.220	17.604.713.155
Tingkat suku bunga per tahun	4 % - 5 %	4,35% - 5,40%

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG IURAN

	2020	2019
MasterCard World Wide	-	50.000.000
Standard Chartered Bank	-	35.000.000
PT BPR Karyajatnika Sadaya	-	15.000.000
PT Cardsindo Tiga Perkasa	-	-
Lainnya	-	121.000.000
Jumlah Piutang Iuran	-	221.000.000

5. ASET TETAP

	2020			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	452.459.136	609.310.378	-	1.061.769.514
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	1.168.498.790	-	-	1.168.498.790
Jumlah	1.620.957.926	609.310.378	-	2.230.268.304
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	240.635.481	128.322.429	-	368.957.909
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	435.646.812	146.062.349	-	581.709.160
Jumlah	676.282.293	274.384.777	-	950.667.070
Nilai Buku	944.675.633			1.279.601.234

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. ASET TETAP (Lanjutan)

	2019			Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	452.459.136	-	-	452.459.136
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	1.168.498.790	-	-	1.168.498.790
Jumlah	1.620.957.926	-	-	1.620.957.926
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	153.532.435	87.103.046	-	240.635.481
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	289.584.463	146.062.349	-	435.646.812
Jumlah	443.116.898	233.165.394	-	676.282.293
Nilai Buku	1.177.841.028			944.675.633

Beban penyusutan sebesar Rp 274.384.777 dan Rp 233.165.394 pada tahun 2020 dan 2019 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 13)

6. ASET TAKBERWUJUD

	2020			Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Perangkat lunak	1.100.099.000	1.517.680.000	-	2.617.779.000
Akumulasi Penyusutan				
Perangkat lunak	293.634.166	200.323.001	-	493.957.167
Nilai Buku	806.464.834			2.123.821.833
	2019			Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Perangkat lunak	1.100.099.000	-	-	1.100.099.000
Akumulasi Penyusutan				
Perangkat lunak	143.609.291	150.024.875	-	293.634.166
Nilai Buku	956.489.709			806.464.834

Aset tidak berwujud memiliki umur manfaat selama 8 tahun dengan menggunakan tarif 12,5 % dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. JAMINAN

	2020	2019
Sewa	428.076.000	421.806.000
Telepon	9.000.000	9.000.000
Jumlah	437.076.000	430.806.000

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2020	2019
Bonus	859.546.905	-
Jasa profesional	59.000.000	-
EAG	-	1.293.525.226
Lain-lain	93.806.736	46.435.504
Jumlah	1.012.353.641	1.339.960.730

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2020	2019
PPN	5.376.709	421.636.579

b. Hutang Pajak

	2020	2019
PPh pasal 4 (2)	28.500.000	27.930.000
PPh pasal 21	534.939.231	153.035.891
PPh pasal 23	15.980.924	99.936.459
PPh pasal 25	6.512.250	25.462.354
PPh pasal 29	1.759.875.646	2.226.862.007
Jumlah hutang pajak	2.345.808.051	2.533.226.711

c. Pajak Kini

	2020	2019
Kenaikan aset bersih	5.416.189.707	10.195.528.515
Beda tetap		
Imbalan pasca kerja	4.511.123.219	922.663.896
Beban pengobatan	169.169.493	133.635.790
Beban pulsa telepon selular	6.905.395	6.295.500
Penyusutan aset tetap	40.112	491.125
Pendapatan bunga bank dan deposito	(457.013.009)	(366.145.014)
Beban lain - lain	176.907.256	119.870.603
Penghasilan kena pajak	9.823.322.173	11.012.340.415
Pembulatan	9.823.322.000	11.012.340.000

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Kini (Lanjutan)

	2020	2019
Beban pajak		
Fasilitas	253.617.882	295.061.807
Tanpa fasilitas	1.653.895.077	2.162.961.386
Jumlah beban pajak kini	1.907.512.958	2.458.023.193
Kredit pajak		
PPh pasal 23	12.640.000	2.000.000
PPh pasal 25	134.997.312	229.161.186
Jumlah Kredit Pajak	147.637.312	231.161.186
Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak	1.759.875.646	2.226.862.007

10. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan memberikan program manfaat PHK karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Perusahaan setiap tahun mencadangkan imbalan kerja kepada peserta pegawai yang akan pensiun guna memberikan kompensasi atas hak ganti rugi, pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003.

Penilaian liabilitas manfaat pegawai dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria Padma Aktuarian Consulting per 31 Desember, dengan perhitungan sebagai berikut:

	2020
Tingkat diskonto	5,91%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6%
Usia pensiun normal (tahun)	58
Mortality	100% TMI3

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Rekonsiliasi aset (liabilitas) manfaat kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:

Jumlah liabilitas yang belum diakui di neraca:

	2020
Nilai kini liabilitas manfaat karyawan	4.511.123.219
Nilai wajar aset program manfaat karyawan	-
Liabilitas program manfaat karyawan	4.511.123.219

Beban manfaat karyawan pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2020
Beban jasa kini	1.767.213.179
Beban bunga	212.851.221
Pengankuan tahun sebelumnya	3.027.540.305
Keutungan aktuarial	(496.481.486)
Jumlah	4.511.123.219

Perubahan pada liabilitas yang diakui di neraca:

	2020
Kewajiban awal tahun	-
Pembayaran manfaat	-
Beban imbalan kerja yang dapat diakui pada tahun	4.511.123.219
Liabilitas akhir tahun	4.511.123.219

11. PENDAPATAN

	2020	2019
MDR debit luran anggota	10.726.873.328	12.441.787.941
NSICC specification	5.493.000.000	5.327.500.000
Fungsi sertifikasi	1.390.888.168	2.460.000.000
Jumlah	20.450.900.319	22.393.287.941

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. BEBAN PROYEK

	2020	2019
Biaya Rapat Urusan Anggota	163.567.901	361.001.900
Biaya Executive Annual Gathering	-	1.293.525.226
Pengembangan spesifikasi NSICCS	-	308.000.000
Biaya Seminar	-	34.085.000
Lainnya	2.746.235	6.600.000
Jumlah	166.314.136	2.003.212.126

13. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2020	2019
Gaji dan upah	7.669.089.638	4.287.725.158
Imbalan Pascakerja	4.511.123.219	-
Sewa	1.140.000.000	1.117.200.000
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	317.611.636	183.001.280
Jasa professional	292.048.500	2.498.357.540
Penyusutan (Catatan 5)	274.384.777	233.165.394
Amortisasi (Catatan 6)	200.323.001	150.024.875
Alokasi kesehatan	169.169.493	133.635.790
Alat tulis dan kebutuhan kantor	110.093.519	68.086.121
Internet	90.302.621	81.402.261
Rapat kantor	86.340.297	71.705.288
Pengiriman surat dan dokumen	61.134.514	37.548.645
Transportasi	29.896.995	26.599.900
Pemeliharaan	28.281.500	36.179.637
Telepon	20.097.386	19.966.785
Perjalanan dinas	-	193.866.606
Lain-lain	323.313.892	289.417.837
Jumlah	15.323.210.988	9.427.883.117

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. LIABILITAS KONTINJENSI

Asosiasi tidak mempunyai liabilitas kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2020.

15. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Asosiasi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan terlampir yang telah diselesaikan pada tanggal 14 April 2021.
